



## Peran SIMKARI dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kejaksaan di Era Digital pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Sri Yulianty Mozin<sup>1</sup>, Khairunnisa Ahmad<sup>2\*</sup>, Selvia Ningsi Panigoro<sup>3</sup>, Wulandari Putri Radjak<sup>4</sup>, Fadillah Abdullah<sup>5</sup>, Indriyani Lumentut<sup>6</sup>, Sri Yulianty Mozin<sup>7</sup>, Rahmatia Pakaya<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [yulmozin@ung.ac.id](mailto:yulmozin@ung.ac.id)<sup>1</sup> [ichaahmad188@gmail.com](mailto:ichaahmad188@gmail.com)<sup>2</sup> [selvipanigoro23@gmail.com](mailto:selvipanigoro23@gmail.com)<sup>3</sup>  
[ulanradjak03@gmail.com](mailto:ulanradjak03@gmail.com)<sup>4</sup> [fadillah.abdullah12@gmail.com](mailto:fadillah.abdullah12@gmail.com)<sup>5</sup> [indrylumentut2004@gmail.com](mailto:indrylumentut2004@gmail.com)<sup>6</sup>  
[yulmozin@ung.ac.id](mailto:yulmozin@ung.ac.id)<sup>7</sup> [rahmatia\\_pakaya@ung.ac.id](mailto:rahmatia_pakaya@ung.ac.id)<sup>8</sup>

Alamat Kampus : Jl. Jendral Sudirman No.6, Kelurahan Wumial, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Korespondensi penulis: [ichaahmad188@gmail.com](mailto:ichaahmad188@gmail.com)

**Abstract.** *This research examines the role of SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan) in enhancing transparency and accountability at the High Prosecutor's Office of Gorontalo in the digital era. The implementation of SIMKARI, as a digital management information system, is aimed at improving the efficiency of data management, monitoring, and reporting within the institution. Through qualitative research methods including literature study, observation, and interviews with key stakeholders at the High Prosecutor's Office of Gorontalo, this study identifies both the benefits and challenges associated with SIMKARI's use. The results indicate that SIMKARI has significantly contributed to the transparency of public information and the accountability of internal performance. However, challenges such as limited digital literacy and infrastructure issues remain. The study concludes that continuous improvement and strategic collaboration are necessary to optimize SIMKARI's effectiveness in supporting a transparent and accountable justice system.*

**Keywords:** SIMKARI, transparency, accountability, digital era, Gorontalo High Prosecutor's Office, public information, management information system.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji peran SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kejaksaan Tinggi Gorontalo di era digital. Implementasi SIMKARI sebagai sistem informasi manajemen digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, pemantauan, dan pelaporan di dalam lembaga. Melalui metode penelitian kualitatif yang meliputi studi literatur, observasi, dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, penelitian ini mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan SIMKARI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKARI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi informasi publik dan akuntabilitas kinerja internal. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan masalah infrastruktur masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan dan kolaborasi strategis diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas SIMKARI dalam mendukung sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** SIMKARI, transparansi, akuntabilitas, era digital, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, informasi publik, sistem informasi manajemen.

### 1. LATAR BELAKANG

Pada era digital saat ini, institusi pemerintah dituntut untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam transformasi tersebut adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Kejaksaan, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan bersih. Oleh

karena itu, penerapan sistem informasi yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kinerja kejaksaan. Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) merupakan salah satu inovasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan RI untuk mendukung manajemen informasi di lingkungan kejaksaan. SIMKARI hadir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kebutuhan akan sistem kerja yang terintegrasi, transparan, serta akuntabel. Dengan fitur-fitur seperti manajemen perkara, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelaporan kinerja, SIMKARI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta integritas kerja aparat kejaksaan (Aqmarina & Latief, 2021).

Transparansi dalam lembaga penegak hukum berarti memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik terhadap proses dan hasil kerja institusi, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya secara objektif dan terukur. SIMKARI, sebagai sistem digital, diyakini mampu mendorong keduanya melalui proses otomatisasi dan pendokumentasian aktivitas secara digital. Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai salah satu entitas vertikal Kejaksaan Agung turut mengimplementasikan SIMKARI dalam operasional sehari-harinya. Dengan wilayah kerja yang luas dan dinamika sosial yang kompleks, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menghadapi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan informasi, pelaporan kinerja, serta pengawasan internal. Oleh karena itu, penerapan SIMKARI diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperkuat mekanisme kontrol internal serta meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik.

Namun demikian, implementasi SIMKARI tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, infrastruktur teknologi yang memadai, serta komitmen pimpinan lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap peran SIMKARI di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana SIMKARI berkontribusi dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi SIMKARI, serta memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi pemanfaatannya di masa mendatang (Chairul, 2019).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan profesionalitas lembaga penegak hukum. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya

reformasi birokrasi kejaksaan, khususnya dalam hal tata kelola informasi berbasis digital. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran SIMKARI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dinamika implementasinya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Good Governance**

Good Governance merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Dalam konteks Kejaksaan, penerapan prinsip good governance berarti bahwa segala proses yang terjadi harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut para ahli yang dikatana Thomas Carothers dalam bukunya "Aiding Democracy Abroad" mengemukakan bahwa good governance bukan hanya soal kebijakan yang baik, tetapi juga bagaimana negara atau lembaga publik menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari untuk menciptakan kepercayaan publik (Carothers, 2011).

Korelasi antara teori yang digunakan ialah dengan adanya Simkari, Kejaksaan dapat lebih transparan dalam proses administrasi dan penanganan perkara. Masyarakat dan pihak terkait bisa lebih mudah mengakses informasi tentang status dan proses hukum, yang mengarah pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

### **Teori Akuntabilitas Publik**

Menurut James S. Coleman dalam bukunya "Foundations of Social Theory", akuntabilitas dalam organisasi publik adalah mekanisme yang memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik, dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Coleman, 1994). Akuntabilitas Publik mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Lembaga publik harus dapat menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada public. Sehingga Simkari berperan penting dalam menyediakan bukti dan rekam jejak dari proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Melalui sistem ini, setiap langkah yang diambil oleh Kejaksaan dapat diaudit dan dilihat oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat, yang meningkatkan akuntabilitas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dan kontekstual melalui data yang bersifat naratif dan interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat struktural, staf operator SIMKARI, dan pihak terkait lainnya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan informasi konseptual mengenai sistem informasi manajemen publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta peran teknologi informasi dalam lembaga penegak hukum. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana SIMKARI digunakan dalam kegiatan operasional kejaksaan, termasuk alur penginputan data, proses pelaporan, dan integrasi antardivisi. Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna sistem. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola, makna, dan hubungan antar-temuan yang mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Landasan Hukum Dan Tujuan SIMKARI Dalam Reformasi Birokrasi Kejaksaan**

SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan. Penerapan sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan lembaga publik untuk menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat. Selain itu, SIMKARI juga mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Tujuan utama dari implementasi SIMKARI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi perkara, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kejaksaan. Melalui sistem ini, diharapkan setiap tahapan penanganan perkara dapat terdokumentasi dengan baik, memudahkan pemantauan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, SIMKARI juga bertujuan untuk mempercepat proses

pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Aulia et al., 2024).

Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, penerapan SIMKARI diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan perkara yang semakin kompleks. Dengan wilayah kerja yang luas dan jumlah perkara yang terus meningkat, sistem ini menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Selain itu, SIMKARI juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarunit di lingkungan Kejaksaan, sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Namun, implementasi SIMKARI tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan sistem, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai di beberapa daerah. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman tentang manfaat sistem ini juga menjadi hambatan dalam proses implementasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh jajaran, serta memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya SIMKARI juga perlu dilakukan secara intensif kepada seluruh pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan implementasi SIMKARI dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan (Kurniyasari et al., 2022).

Dalam konteks reformasi birokrasi, SIMKARI juga berperan sebagai alat untuk mengukur kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kejaksaan. Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ini, pimpinan dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja masing-masing unit, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, SIMKARI bukan hanya sekadar alat teknologi informasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja di lingkungan Kejaksaan. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Kejaksaan untuk menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Ke depan, evaluasi dan pengembangan SIMKARI perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan dan penyedia

teknologi informasi, juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi SIMKARI di masa depan (Kurniyasari et al., 2022).

### **Implementasi SIMKARI Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo : Tantangan dan Peluang**

Implementasi SIMKARI di Kejaksaan Tinggi Gorontalo merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan sistem. Meskipun telah dilakukan pelatihan, namun tingkat pemahaman dan keterampilan pengguna masih bervariasi, sehingga mempengaruhi efektivitas penggunaan SIMKARI. Selain itu, kendala infrastruktur juga menjadi hambatan dalam implementasi SIMKARI. Beberapa unit kerja di Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih menghadapi masalah terkait konektivitas internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan proses input data dan akses informasi menjadi terhambat, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam penerapan SIMKARI. Sebagian pegawai merasa nyaman dengan cara kerja konvensional dan enggan beralih ke sistem digital. Kurangnya pemahaman tentang manfaat dan urgensi penggunaan SIMKARI menyebabkan rendahnya tingkat adopsi sistem di kalangan pegawai (Romahdoni et al., 2023).

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan adanya komitmen dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk terus mendukung implementasi SIMKARI, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, penggunaan SIMKARI dapat menjadi alat utama dalam meningkatkan efisiensi kerja. Sistem ini berpotensi menjadi pusat data dan informasi yang komprehensif, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis data dan mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat mengganggu proses hukum. Di samping itu, peluang lainnya terletak pada dukungan regulasi nasional terkait transformasi digital dalam institusi pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, maka Kejaksaan Tinggi Gorontalo memiliki legitimasi dan arahan yang kuat untuk terus mengembangkan sistem ini. Dukungan ini juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi teknologi informasi, perguruan tinggi, maupun lembaga donor yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Implementasi SIMKARI juga memberi peluang besar dalam hal peningkatan kepercayaan masyarakat. Ketika data perkara, jadwal sidang, dan hasil penanganan kasus dapat

diakses atau diketahui secara sistematis dan terekam dengan baik melalui sistem, publik akan lebih percaya pada integritas institusi kejaksaan. Ini sangat penting mengingat salah satu indikator utama keberhasilan lembaga penegak hukum adalah kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme aparturnya. SIMKARI pun berpotensi menjadi alat bantu dalam pengawasan internal. Sistem ini dapat digunakan oleh pengawas internal untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap alur penanganan perkara, kecepatan layanan, serta beban kerja jaksa. Dengan begitu, pimpinan dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur dan segera melakukan pembenahan. Sebagai peluang strategis lainnya, sistem SIMKARI dapat dikembangkan menjadi platform yang terintegrasi dengan lembaga peradilan lainnya, seperti pengadilan dan kepolisian. Dengan sistem terintegrasi, proses hukum dari hulu ke hilir dapat termonitor dan terdokumentasi secara efisien, sehingga mengurangi tumpang tindih informasi dan mempercepat penanganan perkara (Elvina et al., 2023).

Keberhasilan SIMKARI juga akan sangat ditentukan oleh budaya kerja di lingkungan Kejaksaan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir atau mindset menjadi faktor kunci yang harus terus dibangun. Pegawai perlu disadarkan bahwa sistem ini bukanlah beban tambahan, melainkan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta bertanggung jawab. Dengan kata lain, SIMKARI bukan hanya proyek teknologi, tetapi transformasi organisasi yang menyentuh berbagai aspek kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan implementasinya pun tidak bisa semata-mata teknis, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis, psikologis, dan manajerial. Hanya dengan pendekatan menyeluruh tersebut, SIMKARI dapat memberikan manfaat optimal bagi Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

### **SIMKARI Sebagai Alat Peningkat Transparansi Publik**

Salah satu aspek utama yang ingin dicapai melalui penerapan SIMKARI adalah peningkatan transparansi informasi kepada publik. Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan SIMKARI, informasi terkait tahapan proses hukum, data statistik penanganan perkara, hingga laporan kinerja institusi dapat diakses secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses hukum dijalankan dan sejauh mana komitmen kejaksaan terhadap keadilan. Melalui fitur manajemen informasi dalam SIMKARI, masyarakat, pers, dan lembaga pengawas eksternal dapat memantau indikator-indikator penting dalam proses peradilan seperti jumlah perkara yang sedang ditangani, status

penanganan, dan waktu penyelesaian perkara. Data yang sebelumnya sulit diakses atau hanya tersedia dalam bentuk arsip manual kini dapat disajikan secara digital dan real time. Ini merupakan lompatan besar dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Transparansi publik melalui SIMKARI juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi yang kredibel tentang perkara dan kinerja jaksa, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan tekanan positif agar setiap proses hukum dijalankan sesuai prosedur. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan hukum, tetapi juga subjek pengawasan terhadap penyelenggaraan keadilan. Dalam konteks ini, SIMKARI berfungsi sebagai jembatan antara institusi penegak hukum dengan warga negara (Taslia & Sunoto, 2023).

Kejaksaan Tinggi Gorontalo juga mulai memanfaatkan data dari SIMKARI dalam penyusunan laporan publik, baik melalui situs resmi, publikasi berkala, maupun laporan kinerja tahunan. Ini menjadi langkah awal yang baik untuk menjadikan sistem informasi sebagai bagian dari komunikasi institusi kepada masyarakat. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal menyampaikan informasi secara komunikatif, akurat, dan tepat waktu kepada publik luas. Meski begitu, implementasi transparansi berbasis digital ini tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah di beberapa wilayah Gorontalo. Tidak semua warga memiliki akses mudah terhadap teknologi atau kemampuan untuk memahami informasi digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu menyesuaikan metode diseminasi informasi agar tetap bisa menjangkau masyarakat secara luas, misalnya dengan pendekatan berbasis komunitas atau edukasi langsung di lapangan. Di sisi lain, Kejaksaan juga harus menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan informasi. Tidak semua data dapat dibuka kepada publik, terutama yang berkaitan dengan strategi penyidikan, identitas saksi, atau kasus yang masih berjalan. SIMKARI harus dirancang dengan sistem klasifikasi data dan akses yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan tidak melanggar etika penegakan hukum dan perlindungan privasi.

Transparansi yang dibangun melalui SIMKARI bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang progresif dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Masyarakat akan lebih percaya pada institusi yang terbuka dan mau dievaluasi secara publik. Dengan demikian, citra Kejaksaan dapat meningkat dan kontribusinya dalam sistem hukum nasional menjadi semakin signifikan. Sebagai penutup pembahasan ini, SIMKARI membuka peluang besar untuk menjadikan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai pelopor transparansi penegakan hukum di tingkat daerah. Namun,

keberhasilan ini sangat tergantung pada komitmen institusi untuk terus memperbaiki sistem, mendidik masyarakat, serta membangun budaya kerja yang terbuka dan jujur. Transparansi bukan hanya hasil dari sistem, tapi dari komitmen dan integritas orang-orang di dalamnya (Setiawan & Effiyaldi, 2022).

Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset Negara (SIMKARI) adalah salah satu sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset negara, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan akuntabel. Transparansi publik menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan SIMKARI, karena sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses lebih mudah dan lebih jelas terkait dengan penggunaan dana negara dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi berarti memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh publik terkait dengan alokasi dan penggunaan anggaran negara. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa melihat bagaimana dana publik digunakan, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, serta apakah pengelolaan aset negara dilakukan secara efisien.

Transparansi juga memiliki dampak langsung dalam meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran, karena dengan sistem yang terbuka, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi jika terjadi ketidaksesuaian atau penyelewengan (Andriall & Nasir, 2023).

SIMKARI sebagai Alat untuk Meningkatkan Transparansi Publik SIMKARI hadir dengan berbagai fitur yang mendukung transparansi publik dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Beberapa cara SIMKARI dapat meningkatkan transparansi publik adalah sebagai berikut:

a. Aksesibilitas Informasi Keuangan dan Aset yang Lebih Terbuka

SIMKARI memfasilitasi pemantauan dan pelaporan keuangan negara secara digital dan real-time. Masyarakat atau pihak terkait dapat dengan mudah mengakses informasi terkait alokasi anggaran, penggunaan dana, serta status pengelolaan aset negara. Misalnya, informasi terkait pengeluaran anggaran atau status inventarisasi aset dapat dengan mudah diakses oleh publik, memungkinkan mereka untuk memeriksa apakah anggaran tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan rencana dan tujuan.

b. Penyajian Data yang Jelas dan Terstruktur

SIMKARI menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir. Hal ini memudahkan publik dalam memahami laporan keuangan yang disajikan, karena data

disajikan dengan cara yang lebih sederhana dan transparan. Penyajian data yang jelas meminimalisir potensi terjadinya salah tafsir atau kebingungan yang sering terjadi pada laporan keuangan yang disusun secara manual atau tidak terstruktur dengan baik.

c. Penyederhanaan Proses Pelaporan Keuangan

Salah satu aspek yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan negara adalah proses pelaporan yang panjang dan kompleks. SIMKARI memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih sederhana dan otomatis. Dengan sistem yang terintegrasi, laporan keuangan dapat disusun secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem, sehingga mengurangi kemungkinan adanya kesalahan manusia. Selain itu, laporan keuangan yang otomatis juga dapat dengan mudah disebarluaskan kepada publik, sehingga meningkatkan transparansi.

d. Pelaporan Secara Berkala dan Real-Time

Dengan SIMKARI, laporan keuangan dan pengelolaan aset negara dapat dihasilkan secara berkala dan bahkan real-time. Masyarakat dapat dengan cepat mengetahui informasi terbaru terkait dengan penggunaan anggaran negara, yang memudahkan mereka untuk melakukan pemantauan dan memberikan feedback. Hal ini mendorong akuntabilitas karena pengelola anggaran negara harus memastikan bahwa pengeluaran mereka selalu tercatat dengan benar dan dapat diakses oleh publik.

e. Pemantauan Aset Negara Secara Digital

Pengelolaan aset negara yang lebih transparan dapat dilakukan dengan adanya SIMKARI. Dalam sistem ini, setiap aset yang dimiliki oleh negara tercatat dengan detail, mulai dari jenis aset, lokasi, kondisi, hingga nilai perolehan. Data ini dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengetahui bagaimana aset negara dikelola dan digunakan. Ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan atau penggelapan aset negara yang mungkin terjadi.

f. Peningkatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Lembaga Pengawas

SIMKARI memberikan kemudahan bagi lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan aset negara. Dengan sistem yang lebih terbuka, lembaga-lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat lebih mudah melakukan audit dan pemantauan, serta menindaklanjuti temuan yang ada. Hal ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

g. Meminimalisir Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Dengan adanya sistem yang transparan, penggunaan anggaran negara dapat diawasi dengan lebih ketat. Proses alokasi dan penggunaan dana yang dapat dipantau secara langsung mengurangi peluang terjadinya penyelewengan atau praktik korupsi. SIMKARI mendorong pemerintahan yang lebih jujur dan bersih dengan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat (Subuh & Permana, 2025).

Manfaat SIMKARI dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Selain meningkatkan transparansi, SIMKARI juga berkontribusi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan aset negara yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi dengan jelas bagaimana dana digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, SIMKARI membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan akuntabilitas juga mengarah pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Karena penggunaan dana selalu diawasi dan tercatat dengan jelas, maka pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan dana negara, memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Subuh & Permana, 2025).

Tantangan dalam Penerapan SIMKARI untuk Transparansi Publik Meskipun SIMKARI memiliki banyak potensi untuk meningkatkan transparansi publik, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan:

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di Beberapa Wilayah

Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi tantangan besar dalam penerapan SIMKARI. Tanpa dukungan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, pelaksanaan sistem ini bisa terhambat, sehingga transparansi yang diinginkan tidak dapat tercapai sepenuhnya.

b. Perluasan Keterampilan SDM

Agar SIMKARI dapat digunakan secara optimal, diperlukan tenaga kerja yang terlatih dalam teknologi informasi dan pengelolaan keuangan. Kurangnya keterampilan di kalangan pegawai pemerintah dalam mengoperasikan sistem baru ini bisa mengurangi efektivitas transparansi yang ingin dicapai.

c. Kesadaran dan Dukungan dari Pihak Pemerintah

Meskipun SIMKARI menawarkan banyak manfaat, penerapannya membutuhkan komitmen penuh dari seluruh tingkat pemerintahan. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, keberhasilan implementasi sistem ini dapat terhambat (Suryadi & Supardi, 2021).

SIMKARI merupakan alat yang sangat potensial dalam meningkatkan transparansi publik terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset negara. Dengan menyediakan akses yang lebih terbuka, terstruktur, dan akurat terkait dengan penggunaan anggaran negara, SIMKARI berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya negara. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur, pelatihan SDM, dan dukungan pemerintah tetap harus diatasi agar penerapan sistem ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

#### **D. SIMKARI Sebagai Instrumen Akuntabilitas Kinerja Internal**

Selain transparansi, salah satu nilai strategis yang didorong melalui penerapan SIMKARI adalah akuntabilitas, khususnya dalam konteks kinerja internal institusi Kejaksaan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban moral dan administratif aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diembannya secara objektif. SIMKARI berperan penting dalam memfasilitasi dokumentasi, pelaporan, serta monitoring atas kinerja setiap unit kerja dan individu di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sistem ini memungkinkan pimpinan kejaksaan untuk memantau kinerja harian, mingguan, dan bulanan dari masing-masing unit, mulai dari penanganan perkara hingga penyelesaian tugas administrasi. Setiap data yang diinput dalam SIMKARI memberikan jejak digital (digital footprint) yang tidak mudah diubah, sehingga menjadi alat kontrol yang sangat efektif dalam menilai disiplin dan produktivitas pegawai. Dengan kata lain, SIMKARI menciptakan sistem kerja yang lebih terukur dan berbasis pada data aktual (Sahadan et al., 2023)

Lebih lanjut, data dalam SIMKARI juga digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rapat koordinasi internal. Misalnya, unit yang memiliki jumlah perkara tinggi namun penyelesaiannya rendah dapat segera diidentifikasi untuk ditelusuri penyebabnya. Apakah karena kekurangan SDM, hambatan teknis, atau faktor lain. Dari situ, pimpinan dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dan berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar asumsi. SIMKARI juga mendukung pelaksanaan reward and punishment secara lebih objektif. Pegawai atau unit kerja yang menunjukkan kinerja baik dapat diberi penghargaan berdasarkan data yang terekam dalam sistem, sementara mereka yang tidak disiplin atau tidak produktif dapat diberikan pembinaan atau sanksi yang sesuai. Hal ini menciptakan budaya kerja

yang kompetitif, sehat, dan akuntabel, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang terukur.

Dalam konteks ini, SIMKARI bukan hanya sekadar alat bantu administrasi, melainkan bagian dari sistem pengendalian internal institusi. Data yang masuk dalam sistem secara otomatis terintegrasi dengan laporan kinerja instansi, sehingga tidak perlu lagi melakukan pelaporan manual yang sering kali memakan waktu dan rawan manipulasi. Dengan digitalisasi ini, proses akuntabilitas menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Kendati demikian, efektivitas SIMKARI dalam membangun akuntabilitas juga sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan integritas pengguna sistem. Jika sistem hanya digunakan sebagai formalitas atau hanya untuk kepentingan laporan tanpa komitmen terhadap substansi data, maka fungsinya sebagai alat kontrol akan menjadi lemah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh jajaran memahami pentingnya kejujuran dalam penginputan dan pelaporan melalui SIMKARI (Prasetya & Choldun, 2024).

Untuk mengoptimalkan akuntabilitas, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dapat memanfaatkan fitur analisis data dan statistik dalam SIMKARI guna merancang strategi peningkatan kinerja secara berkala. Misalnya, dari tren penanganan perkara yang tercatat dalam sistem, dapat dianalisis apakah ada pola penurunan kinerja di bulan-bulan tertentu dan mengapa hal itu terjadi. Dengan pemanfaatan data analitik, lembaga dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi. Dengan demikian, SIMKARI tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga membangun kultur kerja yang bertanggung jawab dan profesional. Sistem ini membantu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang jelas, target yang terukur, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tapi tentang membentuk sistem yang mampu mendeteksi, menilai, dan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.

### **Evaluasi Dan Strategi Penguatan SIMKARI Di Masa Mendatang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pejabat struktural dan operator SIMKARI di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terdapat sejumlah masukan penting terkait efektivitas dan tantangan implementasi SIMKARI. Salah satu poin utama yang diangkat oleh narasumber adalah pentingnya peningkatan pelatihan teknis secara berkala. Seorang narasumber dari bagian pembinaan menyebutkan bahwa "tidak semua pegawai memiliki latar belakang IT yang kuat, sehingga dibutuhkan pelatihan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan update sistem yang terus berkembang." Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih ada unit kerja yang belum sepenuhnya memanfaatkan fitur-

fitur dalam SIMKARI secara optimal. Misalnya, beberapa fitur pelaporan kinerja masih sering diisi secara terburu-buru menjelang akhir bulan, hanya untuk memenuhi kewajiban formal. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMKARI masih dipandang sebagai alat pelaporan, bukan sebagai alat manajemen yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara real time. Salah satu narasumber dari bidang intelijen menambahkan bahwa “seharusnya sistem ini digunakan sebagai dashboard manajemen, bukan sekadar aplikasi input data.” (Sahadan et al., 2023)

Dari sisi infrastruktur, wawancara dengan staf IT menunjukkan bahwa konektivitas internet dan keandalan perangkat komputer masih menjadi kendala teknis, khususnya di kantor cabang atau pos layanan di daerah terpencil. Masalah ini menyebabkan keterlambatan penginputan data, yang pada gilirannya mengganggu validitas dan ketepatan waktu laporan kinerja. Narasumber tersebut menyatakan, “ada kalanya jaringan drop, lalu input data tidak bisa dilakukan. Jadi ada backlog data yang menumpuk dan mempersulit monitoring harian.” Meskipun begitu, sebagian besar narasumber sepakat bahwa keberadaan SIMKARI membawa perubahan positif terhadap kultur kerja, terutama dalam hal pencatatan dan dokumentasi. Seorang jaksa fungsional menyebutkan bahwa “dulu kita kerja, semua arsip masih manual, jadi kadang sulit dicari. Sekarang semua terdokumentasi digital. Kalau ada pemeriksaan, tinggal buka data di SIMKARI.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan efisiensi dan ketertiban dalam pengelolaan data institusi.

Dari hasil wawancara juga muncul rekomendasi agar SIMKARI lebih dikembangkan dari sisi antarmuka (user interface) dan kemudahan penggunaannya. Beberapa pengguna merasa sistem ini masih terlalu teknis dan memerlukan terlalu banyak klik untuk menyelesaikan satu proses. Diharapkan ada penyederhanaan alur kerja atau dashboard yang lebih intuitif, sehingga tidak membebani pengguna non-teknis. “Kadang hanya untuk cetak satu laporan, harus klik sampai lima tahapan,” ungkap salah satu operator. Strategi penguatan yang diusulkan berdasarkan wawancara mencakup penambahan tenaga IT pendamping di tiap bidang, penunjukan “champion user” di tiap unit sebagai penggerak digitalisasi, serta kolaborasi lintas lembaga untuk penguatan sistem. Salah satu narasumber dari bagian perencanaan mengatakan bahwa “kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau BSSN bisa memperkuat sisi keamanan dan efisiensi sistem.” Ini menunjukkan bahwa SIMKARI tidak cukup hanya dikelola internal, tetapi membutuhkan sinergi luas (Subuh & Permana, 2025).

Selain itu, disarankan juga agar ada mekanisme umpan balik langsung dari pengguna kepada pengembang sistem secara berkala. Hal ini bertujuan agar sistem terus berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Seorang narasumber senior menyarankan “bikin sistem itu

jangan top down saja, tapi dengar juga dari bawah. Mereka yang paling tahu susahnyanya di mana.” Pendekatan partisipatif seperti ini diyakini dapat meningkatkan adopsi sistem secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun SIMKARI telah memberikan dampak positif dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun masih diperlukan strategi penguatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di lapangan. Optimalisasi sistem ini akan menjadi kunci dalam membangun Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang modern, akuntabel, dan terbuka di era digital (Romahdoni et al., 2023)

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIMKARI di Kejaksaan Tinggi Gorontalo berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum tersebut. SIMKARI memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien, memudahkan akses publik terhadap informasi yang relevan, serta meningkatkan pengawasan kinerja internal. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal keterampilan teknis pengguna dan infrastruktur yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberlanjutan dan pengoptimalan sistem ini. Secara keseluruhan, SIMKARI memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di era digital.

Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo memperkuat pelatihan teknis bagi seluruh pegawai dalam penggunaan SIMKARI, serta meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kelancaran operasional sistem. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala dengan melibatkan umpan balik dari pengguna di lapangan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan aktual. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi dan lembaga lain juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem, serta mempercepat proses digitalisasi di lingkungan Kejaksaan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi yang berharga dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada rekan-rekan akademisi, praktisi kejaksaan, dan semua pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi

positif bagi pengembangan sistem manajemen informasi dan reformasi tata kelola lembaga penegak hukum di Indonesia..

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andriall, S., & Nasir, M. (2023). Usability Testing Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) di Kejaksaan Negeri PALI. *Journal of Computer and Information Systems Ampera*, 4(3), 126–140.
- Aqmarina, N. S., & Latief, M. I. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Aplikasi Simkari CMS Menggunakan Framework Cobit 5 Dengan Domain EDM Dan DSS (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara). *INTEGER: Journal of Information Technology*, 6(1).
- Aulia, Z. M., Hidayat, T., Al Fauzan, F., & Sutardi, S. (2024). SISTEM INFORMASI REKAP ABSENSI BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA). *Journal Peqguruang: Conference Series*, 6(2), 587–594.
- Carothers, T. (2011). *Aiding democracy abroad: The learning curve*. Carnegie Endowment.
- Chairul, H. (2019). SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI. *In Search– Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism*, 18(01), 151–160.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of social theory*. Harvard university press.
- Elvina, E., Dahri, N., & Hadi, H. S. (2023). Perancangan Sistem Informasi Arsip Digital Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Padang. *Jurnal Manajemen Teknologi Informatika*, 1(3), 125–133.
- Kurniyasari, F. N., Firliana, R., & Sucipto, S. (2022). Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 3(2), 120–132.
- Prasetya, C. D., & Choldun, I. (2024). PERANCANGAN PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT). *Improve*, 16(2), 8–12.
- Romahdoni, M. R., Andriasari, S., & Rahmadaniah, D. (2023). PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-DOCUMENT PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH. *Journal of Software Engineering and Technology*., 3(2), 21–27.
- Sahadan, M. A., Rompas, P. T. D., & Munaiseche, C. P. C. (2023). Analisis Kepuasan

Pelanggan Menggunakan Metode Algoritma C4. 5 Berdasarkan E-Survey Kejaksaan Negeri Minahasa. *JOINTER: Journal of Informatics Engineering*, 4(01), 1–13.

Setiawan, I., & Effiyaldi, E. (2022). Sistem Informasi Manajemen Berkas Perkara Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri Merangin. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 7(3), 501–512.

Subuh, M. U. F., & Permana, I. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 15.

Suryadi, E. A., & Supardi, H. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 1–25.

Taslia, Y., & Sunoto, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Menyurat Pada Kantor Desa Merlung. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, 3(1), 365–373.